

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas atau kuantitas partisipasi pemilih yang tinggi di dalam Pemilu adalah salah satu indikator dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Upaya sosialisasi pendidikan pemilih dalam berbagai bentuk dirasa cukup penting untuk dilakukan sedini mungkin. Siswa sekolah tingkat SMA / sederajat yang akan masuk dan termasuk ke dalam kategori Pemilih Pemula penting untuk mendapatkan pengenalan tentang pemilu dan demokrasi (Regeng, 2018).

Sejak 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Balai Pendidikan Menengah untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih untuk Pemilih Pemula di Lingkungan SMA/SMK di Kabupaten Kulon Progo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Ketua OSIS atau Pemilos. Pemilos sendiri merupakan sebuah wadah yang digunakan oleh siswa di sekolah khususnya tingkat SMA/sederajat untuk dapat memilih dan menentukan Ketua OSIS (Yayulianto. et al., 2017).

OSIS adalah akronim dari Organisasi Siswa Intra Sekolah, dimana organisasi ini mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam pengelolaan berbagai kegiatan kesiswaan yang ada di sekolah. Layaknya sebuah Negara, OSIS adalah pemerintah sedangkan siswa adalah rakyat. OSIS berperan dalam mengatur banyak aktivitas di sekolah yang menyangkut kegiatan kesiswaan. Karena pentingnya kegiatan OSIS di sekolah, penyelenggaraan kegiatan Pemilos juga dirasa sangat penting dalam menentukan masa depan dari sistem organisasi yang ada di sekolah.

Regeng (2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa Pemilihan Ketua OSIS atau biasa disingkat Pemilos merupakan suatu kegiatan tahunan yang bertujuan agar siswa sekolah menengah khususnya tingkat SMA sederajat dapat belajar tentang arti demokrasi sedini mungkin. Kegiatan Pemilos dapat menjadi wadah agar siswa dapat mengerti arti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan merefleksikan kepengurusan OSIS, dari oleh dan untuk siswa. Selain itu siswa dapat mengerti Pemilos sebagai media demokrasi di sekolah yaitu jika Ketua OSIS terpilih, nantinya ia akan menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kepemimpinannya.

Tujuan lain dari kegiatan Pemilos adalah sebagai miniatur Pemilu (Yayulianto. et al., 2017). Dengan bercermin dari Pemilos maka siswa dapat mengerti arti penting dalam memilih pemimpin yang baik serta diharapkan mampu untuk mengerti akan pentingnya terlibat dalam Pemilos untuk memastikan kepentingannya dapat terakomodir dalam program dan kebijakan OSIS, yang mana nantinya siswa diharapkan dapat mengerti pentingnya terlibat dalam setiap tahapan atau proses Pemilu. Terakhir, diharapkan dengan siswa mengikuti kegiatan Pemilos ini, siswa dapat mengenal tahapan, teknis dan aspek penting dalam Pemilu.

Pentingnya kegiatan Pemilos tetap dilaksanakan walaupun keadaan pandemi Covid-19 seperti ini, membuat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Kulon Progo menyampaikan masukan-masukan ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kemudian menjawab keresahan dari MKKS dengan inovasi yaitu pembuatan suatu aplikasi dengan sistem *electronic voting* atau *e-voting* yang diciptakan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kulon Progo.

Aplikasi *E-Pemilos* merupakan jawaban dalam penyelenggaraan Pemilu yang semula diadakan secara konvensional. Karena jika kegiatan tersebut terus dilaksanakan seperti biasanya, dikhawatirkan akan menambah potensi kerumunan yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan *cluster* baru penularan Covid-19. Aplikasi ini dapat diakses oleh sistem android dengan mengunduh aplikasi Jendelaku melalui google playstore, sistem IOS melalui appstore, dan terdapat juga versi *website*. Selanjutnya, cara mengakses Aplikasi ini yaitu pemilih (siswa) memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dapat mengakses aplikasi ini untuk dapat memberikan hak suaranya dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh sekolahnya masing-masing (Yayulianto. et al., 2017). Pemungutan suara elektronik (*electronic voting, e-voting*) menjadi satu pilihan tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari cara pemungutan suara konvensional.

Regeng (2018) menyatakan *e-voting* adalah pemungutan suara elektronik mengacu pada sistem apa pun di mana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan dengan kertas suara *e-voting* dapat membantu mempercepat proses penghitungan, memberikan akses kepada pemilih, menghemat biaya, dan meningkatkan transparansi. Implementasi teknologi informasi melalui *e-voting* menghasilkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan suara dibandingkan dengan menggunakan kertas Seperti yang selama ini dilakukan. Merujuk pada hasil penelitian Ridwan & Arifin (2017), penggunaan *e-voting* dapat mengatasi permasalahan pada sistem pemungutan suara tradisional, seperti proses pemungutan suara berlangsung lebih cepat, mampu memberikan informasi hasil pemungutan suara lebih cepat dan akurat, juga dapat menjamin tidak adanya suara yang tidak sah.

Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai studi kasus dikarenakan kegiatan Pemilu berbasis aplikasi ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan

pada tahun 2021, sehingga peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan masukan atau saran untuk pihak penyelenggara kegiatan E-Pemilos ini. Pengambilan lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk KPU dan Diskominfo untuk kegiatan e-pemilos di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor khususnya sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar dan *event* tahunan yang biasanya diadakan di sekolah akan menjadi sulit untuk dilaksanakan, terutama kegiatan Pemilos. Jika kegiatan tersebut terus dilaksanakan seperti biasanya, dikhawatirkan akan menambah potensi kerumunan yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan *cluster* baru penularan Covid-19. Maka dari itu, aplikasi *E-Pemilos* muncul sebagai jawaban dalam penyelenggaraan Pemilos yang semula diadakan secara konvensional di masa sebelum pandemi. Karena hal tersebut maka penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan: Bagaimana Efektivitas Pendidikan Politik tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E- Pemilos*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ambil di atas, tujuan penelitian dari skripsi peneliti ini adalah untuk mengetahui Efektivitas dari Pendidikan Politik tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksudkan adalah penulis berharap nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan juga mampu menjadi acuan atau menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya yang mengangkat topik yang sama yaitu mengenai kegiatan Pendidikan Politik dan Aplikasi *E-Pemilos*.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dimaksudkan adalah agar penelitian yang disusun ini dapat menjadi saran atau masukan kepada pihak penyelenggara Pendidikan Politik berbasis aplikasi *E-Pemilos*, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian saya menggunakan *literature review* sebanyak 25. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka ini adalah mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka yang saya buat ini saya klasifikasikan menjadi 2 jenis, pertama, kajian mengenai demokrasi di sekolah dan pendidikan pemilih di lingkungan sekolah, kedua, kajian mengenai pemilihan Ketua OSIS, *e-voting* dan *student council elections* yang ada di sekolah.

Literatur yang membahas tentang demokrasi di sekolah dan pendidikan pemilih terdiri dari Sartono (1992), Samsuri et al (2016), Lesilolo et al (2015), Ichsan et al (2013), Perangin-angin et al (2018), Kurniawan et al (2020), Rafni et al (2019),

Nurgiansah (2021), Saufi et al (2020), Juanda (2019), Auliawi (2019), Wahid (2020), dan Lukman et al (2017). Demokrasi dalam lingkup sekolah dilakukan sebagai upaya sistematis oleh negara dan masyarakat untuk membantu individu atau warga negara memahami, menghayati, dan mengamalkan prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan peran sosial dan status yang ia miliki (Juanda, 2019).

Pendewasaan akan kesadaran demokrasi serta penanaman *civic culture* dapat dianggap sebagai salah satu tujuan penting dari Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat diajarkan di sekolah sedini mungkin, sebagai wujud dari demokrasi di sekolah (Sartono, 1992). Samsuri et al (2016) dan Kurniawan et al (2020) sepakat bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan demokrasi memang sudah jelas.

Negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini membutuhkan sarana agar generasi muda pada umumnya dapat memperoleh pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memelihara dan melestarikan demokrasi (Rafni., et al, 2019)

Demokrasi di sekolah adalah asumsi, keyakinan dan sikap demokratis warga sekolah yang bertahan secara kontinyu dan dari waktu ke waktu, dan tersosialisasi diantara warga sekolah (Lesilolo et al, 2015). Budaya Demokratis sekolah disinyalir memiliki kekuatan yang dapat diserap warga sekolah. Hasil penelitian Nurgiansah (2021) menunjukkan walaupun demokrasi di sekolah tidak terlalu nampak tetapi hakikatnya demokrasi ini meresap kuat bahkan menjadi komitmen dan pembenaran tindakan demokratis warga sekolah.

Ichsan et al (2013), Lukman et al (2017) dan Saufi et al (2020) sepakat Pendidikan pemilih bertujuan untuk memberikan layanan edukasi bagi masyarakat

kota/pengunjung untuk belajar kepeiluan dan demokrasi. Pendidikan politik pada intinya bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu warganegara agar dapat menjadi partisipan politik yang aktif, kritis, dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Auliawi, 2019).

Parangin-Angin et al (2018) dan Wahid (2020) sepakat bahwa pendidikan pemilih mestinya menyasar sekolah-sekolah sebagai perwujudan demokrasi di sekolah. Terlebih sekolah tingkat SMA dengan siswa yang memasuki usia pemilih pemula. Penelitian Wahid lebih lanjut menemukan bahwa pendidikan pemilih dan penyuluhan Partisipasi politik terbukti mampu memberikan gambaran tentang pemilu kepada para siswa.

Klasifikasi kedua yaitu literatur mengenai Pemilihan Ketua OSIS atau *student council* melalui *e-voting* yang ada di sekolah, terdiri dari Abidin (2021), Ikhwani (2018), Jatmiko (2021), Kirana (2020), Dahnia (2020), Setyawan et al (2020), Iromini et al (2014), Gwirayi (2010), Watanavisit (2020), Adekita (2018), Darmayunata (2020), dan Salleh (2021). Kelompok literature tersebut sepakat bahwa pendidikan demokrasi di sekolah memang sudah diajarkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau pengenalan demokrasi di sekolah melalui penerapan pendidikan karakter namun langkah lain yang dapat dilakukan untuk siswa yang telah memasuki kriteria pra-pemilih adalah melakukan pendidikan pemilih yang bisa dilakukan melalui kegiatan OSIS atau Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos).

Abidin (2021) dan Ikhwani (2018) sepakat bahwa sangat penting bagi siswa SMA/SMK untuk belajar tentang demokrasi, karena mereka merupakan pemilih pemula dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Dengan menggunakan sistem pemilihan untuk

melaksanakan Pemilihan Ketua OSIS merupakan proses pembelajaran demokrasi langsung bagi seluruh siswa yang bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan pemilu (Kirana, 2020).

Aplikasi Pemilos serupa telah diteliti oleh Setyawan, et al (2020) yang menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan ketua OSIS dan mempermudah siswa maupun guru yang mengawasi pemilihan ketua OSIS tersebut (Darmayunata, 2020). Aplikasi ini membantu pihak sekolah untuk memudahkan pemilihan ketua OSIS serta proses pemilihan ketua OSIS lebih terorganisir dengan baik dari sebelumnya masih melakukan pemilihan ketua OSIS secara manual (Dahnial, 2020).

Sistem pemilihan konvensional harus diganti dengan sistem pemilihan berbasis elektronik atau *e-voting* (Salleh, 2021). Sistem pemilihan dengan berbasis elektronik dapat menghemat waktu dalam proses pemungutan suara sehingga lebih efisien (Jatmiko, 2021). Dilihat dari kesimpulan 2 penelitian ini dapat diketahui bahwasanya memang *e-voting* lebih efektif dan efisien daripada pemilihan secara konvensional.

Watanavisit (2020) Gwirayi (2010) Iromini et al (2014) dan Adekitan (2018) menghasilkan penemuan serupa bahwa untuk mengatasi masalah yang ditemui dalam pemilihan konvensional, adalah melaksanakan pemungutan suara elektronik (*e-voting*). Penelitian ini telah menganalisis bahwa *e-voting* adalah menunjukkan bahwa semua cara tindakan kecurangan telah berkurang drastis dan memberi ruang untuk transparansi.

3. Tabel 1.1 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Demokrasi di sekolah & pendidikan pemilih	Sartono (1992), Samsuri et al (2016), Lesilolo et al (2015), Ichsan et al (2013), Perangin-angin et al (2018), Kurniawan et al (2020), Rafni et al (2019), Nurgiansah (2021), Saufi et al (2020), dan Lukman et al (2017), Juanda (2019), Auliawi (2019), Wahid (2020),	Demokrasi dalam lingkup sekolah dilakukan sebagai upaya sistematis oleh negara dan masyarakat untuk membantu individu atau warga negara memahami, menghayati, dan mengamalkan prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan peran sosial dan status yang ia miliki. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari sosialisasi politik yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana setiap masyarakat harus berpartisipasi dalam sistem politik di negaranya. Langkah lain dari penerapan demokrasi di sekolah adalah juga memfasilitasi sarana pendidikan pemilu bagi siswa yaitu dengan didirikannya organisasi OSIS dan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos)

2	Pemilihan Ketua OSIS atau <i>student council</i> melalui <i>e-voting</i> yang ada di sekolah	Abidin (2021), Jatmiko (2021), Kirana (2020), Ikhwani (2018), Dahnia (2020), Setyawan et al (2020), Iromini et al (2014), Gwirayi (2010), Watanavisit (2020), Adekita (2018), Darmayunata (2020), dan Salleh (2021).	Dengan menggunakan sistem pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan Ketua OSIS merupakan proses pembelajaran demokrasi langsung bagi seluruh siswa yang bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan ketua OSIS dan mempermudah siswa maupun guru yang mengawasi pemilihan ketua OSIS tersebut. Aplikasi ini membantu pihak sekolah untuk memudahkan pemilihan ketua OSIS serta proses pemilihan ketua OSIS lebih terorganisir dengan baik dari sebelumnya masih melakukan pemilihan ketua OSIS secara manual. Pemilihan ketua OSIS berbasis elektronik dinilai lebih efektif dan efisien.
---	--	--	--

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan demokrasi di sekolah dan Pemilihan Ketua OSIS atau *student council* melalui *e-voting* yang ada di sekolah yang akan digunakan untuk penelitian ini. Penelitian akan menggunakan Teori efektivitas milik Duncan yang mana belum pernah ada yang meneliti efektivitas aplikasi *e-voting* menggunakan teori ini di penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Efektivitas Kebijakan

Efektivitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, maka dapat disimpulkan efektivitas adalah keadaan dimana kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik atau berhasil sesuai dengan ekspektasi. Dapat disimpulkan juga bila efektif dapat terkait dengan tercapainya suatu tujuan dalam suatu kegiatan (Fahri, 2017).

Menurut Subagyo (2000) dalam (Budiani, 2007) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997 dalam Budiani, 2007). Senada dengan Gie, Emerson dalam Budiani (2007) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek yang digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Nurchana, 2014).

Selanjutnya, kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Muhadjir (2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan

masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Lebih lanjut Muhadjir (2000) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu mencerminkan rencana kerja organisasi yang dilaksanakan oleh anggota dari organisasi tersebut melalui kegiatan-kegiatan tertentu sehingga rencana kerja yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya dapat tercapai.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rosalina, 2012).

Menurut Duncan (1973) dalam bukunya yang berjudul “*Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness*” ada beberapa hal yang dapat menjadi tolok ukur dari efektivitas suatu kebijakan, antara lain:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan keseluruhan harus dipandang sebagai suatu proses. Indikator ini berfokus pada sejauh mana kebijakan akan terlaksana sesuai tujuan awalnya. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan untuk penelitian Efektivitas Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos* ini dipilih 2 sub-indikator yaitu: kurun waktu dan sasaran.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu institusi untuk mendefinisikan dengan jelas apa-apa saja yang harus dilakukan oleh suatu individu. Oleh karena itu sub-indikator proses sosialisasi dipilih untuk mengukur Efektivitas Pendidikan Politik tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

c. Adaptasi

Duncan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, untuk pengukuran Efektivitas Pendidikan Politik tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos* ini memilih sub indikator yaitu proses peningkatan kemampuan dan sarana-prasarana.

Setelah menyimak definisi-definisi efektivitas kebijakan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan pengukuran teori efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Duncan (1973) yaitu dengan mempertimbangkan faktor Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi untuk mengukur Efektivitas Pendidikan Politik tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

2. Teori Pemilu

Mushoffa (2016) dalam bukunya yang berjudul “Konsep Memperdalam Demokrasi” menjelaskan bahwasanya indikator terendah demokrasi yang ada di suatu Negara dapat ditandai dengan adanya Pemilu atau Pemilihan Umum. Senada dengan pendapat Mushoffa, Al-Hamdi & Anawati (2021) juga mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sistem Negara demokrasi modern. Pemilu merupakan salah satu alat dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaraan Negara agar sesuai dengan kehendak rakyat, dan juga pemilu merupakan media yang sangat penting untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan cara dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung (Mushoffa, 2016).

Tricahyo (2009) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem

perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono (2005) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan.

Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benarbenar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Soedarsono, 2005).

Menurut Asshiddiqie (2006) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya Pemilihan Umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan Umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memwadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses Pemilihan Umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Senada dengan Asshidiqqie, Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003) memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Asas pemilu menurut UU Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Langsung
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum
Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah

berhak untuk ikut memilih tanpa ada diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya rakyat sebagai pemilih dijamin oleh peraturan dan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun, dengan jalan apa pun atas siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam majunya demokrasi di dunia saat ini, kemudian muncul teknologi Pemilu yang dilakukan melalui perangkat elektronik. *Electronic voting (e- voting)* adalah suatu metode pengumpulan suara dalam pemilu dengan menggunakan perangkat elektronik (Guntur, 2020). Pemungutan suara elektronik (*electronic voting, e-voting*) menjadi satu pilihan tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari cara pemungutan suara konvensional. Ridwan & Arifin (2017) menyatakan *e-voting* adalah pemungutan suara elektronik mengacu pada sistem apa pun di mana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan dengan kertas suara. Sehingga pada akhirnya, *e-voting* dapat membantu mempercepat proses penghitungan, memberikan akses kepada pemilih, menghemat biaya, dan meningkatkan transparansi.

Implementasi teknologi informasi melalui *e-voting* menghasilkan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan suara dibandingkan dengan menggunakan kertas seperti yang selama ini dilakukan. Merujuk pada hasil penelitian Sulistyono (2016),

penggunaan *e-voting* dapat mengatasi permasalahan pada sistem pemungutan suara tradisional, seperti proses pemungutan suara berlangsung lebih cepat, mampu memberikan informasi hasil pemungutan suara lebih cepat dan akurat, juga dapat menjamin tidak adanya suara yang tidak sah.

3. Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos)

Pemilihan Ketua OSIS atau biasa disingkat Pemilos merupakan suatu kegiatan tahunan yang bertujuan agar siswa sekolah menengah khususnya tingkat SMA sederajat dapat belajar tentang arti demokrasi sedini mungkin. Kegiatan Pemilos dapat menjadi wadah agar siswa dapat mengerti arti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan merefleksikan kepengurusan OSIS, dari oleh dan untuk siswa. Selain itu siswa dapat mengerti Pemilos sebagai media demokrasi di sekolah yaitu jika Ketua OSIS terpilih, nantinya ia akan menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kepemimpinannya (Regeng, 2018).

Senada dengan Regeng, Yayulianto. et al (2017) dalam Buku Panduan Pemilos menjelaskan bahwasanya Pemilos sendiri merupakan sebuah wadah yang digunakan oleh siswa di sekolah khususnya tingkat SMA/sederajat untuk dapat memilih dan menentukan Ketua OSIS. OSIS adalah akronim dari Organisasi Siswa Intra Sekolah, dimana organisasi ini mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam pengelolaan berbagai kegiatan kesiswaan yang ada di sekolah. Layaknya sebuah Negara, OSIS adalah pemerintah sedangkan siswa adalah rakyat. OSIS berperan dalam mengatur banyak aktivitas di sekolah yang menyakut kegiatan kesiswaan. Karena pentingnya kegiatan OSIS di sekolah, penyelenggaraan kegiatan Pemilos juga dirasa sangat penting dalam menentukan masa depan dari sistem organisasi yang ada di sekolah (Yayulianto. et al., 2017).

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan symbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik(Rahman, 2018)

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'oeed (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai- nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung

Alfian (1990) mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga

mereka memahami dan menghayati betul nilai– nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Definisi konseptual dari masing-masing variabel dapat dikemukakan berdasarkan landasan teori yang sudah diaparkan di atas, seperti:

- 1. Efektivitas kebijakan:** yaitu ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan.
- 2. Pemilu:** wadah yang digunakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan di suatu Negara.
- 3. Pemilihan Ketua OSIS:** wadah yang digunakan oleh siswa di sekolah khususnya tingkat SMA/ sederajat untuk dapat memilih dan menentukan Ketua OSIS.
- 4. Pendidikan Politik:** pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen fundamental yang ada di dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan definisi operasional dapat digunakan untuk menakar suatu variabel yang ada untuk melakukan suatu penelitian. Agar konsep data dapat

diteliti secara empiris, maka konsep tadi wajib dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya sebagai variabel atau sesuatu yg memiliki nilai. Setelah memilih teori efektivitas menurut Duncan (1973) maka penjelasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut:

No	Indikator	Sub Indikator	Penjelasan
1	Pencapaian Tujuan	Kurun waktu	Apakah kurun waktu pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan awal?
		Sasaran	Bagaimana tingkat partisipasi program, apakah sesuai dengan target awal?
			Apakah Asas Pemilu seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat diraskan di kegiatan Pemilos berbasis Aplikasi <i>E-Pemilos</i>
		Apakah partisipan mengikuti kegiatan Pemilos atas kesadaran diri sendiri atau pengaruh dari orang lain	
2	Integrasi	Proses sosialisasi	Apakah partisipan mengerti tentang maksud tujuan diadakannya program?
3	Adaptasi	Peningkatan Kemampuan	Apakah kegiatan Pemilos yang dilaksanakan ini memberikan partisipan gambaran tentang kegiatan
		Sarana Prasarana	Apakah terdapat kendala selama diadakan program tersebut, bagaimana cara mengatasinya?

H. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif, dikatakan Koentjaraningrat (1983) dalam Suwendra (2018)

adalah penelitian dalam bidang ilmu kemanusiaan dengan aktivitas yang

berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta dan hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, tingkah laku, dan rohani manusia untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case study*. Pendekatan ini menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Hadi et al, 2021).

Hadi menjelaskan lebih lanjut bahwa pendekatan studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus yang digunakan di penelitian ini adalah Efektivitas Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

b) Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu data yang diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan petunjuk umum. Pengambilan data kualitatif melalui observasi FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Sedangkan pengambilan data menggunakan teknik wawancara dengan petunjuk umum dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung.

Menurut Yunus (2010) dalam Al-Hamdi et al (2020) wawancara dengan petunjuk umum memiliki pengertian bahwa peneliti harus mempunyai kerangka atau garis besar pembicaraan yang digunakan untuk petunjuk dalam melakukan wawancara.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan video dokumentasi rangkaian kegiatan yang telah di dokumentasikan oleh penyelenggara kegiatan *E-Pemilos*.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah teknis strategis pada seluruh proses penelitian yang tujuannya adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2015 dalam Al-Hamdi et al, 2020). Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah menggunakan Teknik Diskusi Kelompok Terumpun atau *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan studi dokumentasi.

a) **Focus Group Discussion (FGD)**

Hadi et al (2021) menjelaskan Focus Group Discussion (FGD) adalah metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator.

FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu secara spesifik melalui diskusi kelompok. Berbeda dengan metode pengumpul data lainnya, metode FGD memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya, merupakan metode

pengumpul data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat. Karakteristik pelaksanaan kegiatan FGD dilakukan secara obyektif dan bersifat eksternal. FGD membutuhkan fasilitator/moderator terlatih dan terandalkan untuk memfasilitasi diskusi agar interaksi yang terjadi diantara partisipan dan terfokus pada suatu masalah.

1. Focus Group Discussion (FGD)

Perwakilan OSIS, Perwakilan Panitia Pemilihan OSIS (PPO), Perwakilan Guru, dan Perwakilan siswa peserta Pemilos SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relation ship*) antara si pencari informasi (*interviewer* atau informan hunter) dengan sumber informasi (*interviewee*) (Sutopo, 2006).

Selanjutnya, adapun pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo.
- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sistem Informasi/Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti yaitu peninggalan arsip, buku yang berisi pendapat teori, dalil, hukum dan lain sebagainya (Al-Hamdi, et al., 2020). Studi dokumentasi dapat juga didefinisikan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut ketiganya akan digunakan untuk pengumpulan data efektivitas Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

J. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008) dalam Hadi et al (2021) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data menurut Al-Hamdi et al (2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan Pengelolaan data: pada tahap ini setelah selesainya proses pengumpulan data dilakukan proses penyalinan rekaman wawancara ke dalam teks. Data yang terkumpul berupa hasil wawancara maupun data fisik akan diseleksi dan dipilah menurut indikator atau alat ukur yang telah ditentukan.
- 2) Pemilihan Data: Tahap ini melibatkan pemilihan data yang relevan dan berguna selama proses analisis kecuali untuk data yang kurang relevan dengan topik penelitian tidak akan dipakai.

- 3) Analisis Antar Variabel dan Validasi Data: Setelah langkah pemilihan data, langkah selanjutnya adalah menghubungkan penemuan satu variabel dengan variabel lainnya. Selain itu ada tahapan penting yaitu verifikasi data jika ada perbedaan data yang ditemui peneliti maka dilakukan proses ini disarankan untuk konfirmasi dengan pihak terkait untuk membuktikan validasi data.
- 4) Menjelaskan dan menyimpulkan: Langkah menjelaskan merupakan langkah tanggapan dalam merumuskan masalah berdasarkan analisis dan verifikasi data yang dapat diubah. Hasilnya akan menjadi dasar kesimpulan yang menjadi akhir dari rangkaian penelitian. Implikasi teoritis, implikasi praktis, saran dan juga rekomendasi tentunya perlu dicantumkan pada bagian kesimpulan.

K. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek Penelitian. Bab ini akan dibahas tentang Kegiatan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) di Kabupaten Kulon Progo.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai efektivitas Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SMA/ sederajat di Kabupaten Kulon Progo menggunakan aplikasi *E-Pemilos*.

Bab IV, Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran